



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MAX DARMAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG KEBERATAN, BANDING DAN PENGURANGAN - KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA UTARA**
3. NHK : **93382**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

9.081.180.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 517.041.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 836.360.000
3. Bangunan Seluas 7382 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.293.880.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/73 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 452.654.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 649 m2/414 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 5.925.045.000
6. Tanah Seluas 1123 m2 di KAB / KOTA Toba Samosir, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.000.000
7. Tanah Seluas 729 m2 di KAB / KOTA Toba Samosir, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.000.000
8. Tanah Seluas 1037 m2 di KAB / KOTA Toba Samosir, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.000.000
9. Tanah Seluas 3340 m2 di KAB / KOTA Toba Samosir, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.000.000
10. Tanah Seluas 2789 m2 di KAB / KOTA Toba Samosir, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.000.000



11. Tanah Seluas 320 m2 di KAB / KOTA TAPANULI UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 51.200.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 350.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA V Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 860.233.100

D. SURAT BERHARGA Rp. 495.207.781

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.721.198.581

F. HARTA LAINNYA Rp. 3.368.623.922

Sub Total Rp. 18.876.443.384

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 18.876.443.384

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.